

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PEMBUBARAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Oleh:

Avin Pujiastuti
C05215006



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Avin Pujiastuti

NIM : C05215006

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata
Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pembubaran Organisasi
Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Surabaya, 10 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Avin Pujiastuti
NIM. C05215006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Avin Pujiastuti NIM C05215006 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunculkan.

Surabaya, 13 Mei 2019

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH

NIP. 196803242000032001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Avin Pujiastuti NIM. C05215006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH
NIP. 196803242000032001


Penguji II,


Dr. Muzahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,


Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,


Siti Tatmaulidi Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 01 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Avin Pujiastuti
NIM : C05215006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : avin.pujia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMASYRAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2019

Penulis

Avin Pujiastuti

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? dan Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan (*library research*). Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif dengan mengemukakan teori *Wilāyah al-Ḥisbah* dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* kemudian diaplikasikan bersifat khusus yaitu mekanisme pembubaran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan perlu menggunakan pertimbangan peradilan dengan beberapa alasan. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menjamin akan hak-hak ormas dalam kepastian hukum yang adil, serta Pasal 61 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2017 menggunakan *asas contrarius actus* akan menimbulkan penyalahgunaan pemerintah terhadap wewenangnya dalam pencabutan status badan hukum ormas. Dalam kajian *Fiqh Siyāsah*, ada lembaga peradilan dikenal *wilāyah al-Hisbah*, yang khusus menangani dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni menyerukan kebaikan apabila hal munkar mulai dikerjakan. Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 dasar dari *wilāyah al-Hisbah* dalam melakukan pengawasan dan memberikan hukuman, dan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dalam menangani seseorang maupun ormas yang menjalankan kemungkaran.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan untuk tetap mencantumkan proses peradilan atau adanya batasan terhadap pemerintah dalam menggunakan *asas contrarius actus* dalam UU No. 16 Tahun 2017, agar tetap menjaga hak perlindungan ormas dan kepentingan umum. Dan untuk masyarakat, perlu adanya batasan terhadap ormas yang akan berpendapat atau mengeluarkan aspirasi agar tidak adanya perpecahan dalam NKRI.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Kajian Pustaka | 11 |
| E. Tujuan Penelitian | 14 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian | 14 |
| G. Definisi Operasional | 15 |
| H. Metode Penelitian | 16 |
| I. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN <i>WILĀYAH AL-HISBAH</i> SERTA RUANG LINGKUPNYA | |
| A. <i>Fiqh Siyāsah</i> | 22 |
| 1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> | 22 |
| 2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> | 24 |
| 3. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> dan Ruang Lingkupnya | 26 |
| B. <i>Wilāyah al-Hisbah</i> | 31 |

1. Pengertian *Wilāyah al-Ḥisbah* 31
2. Sejarah *Wilāyah al-Ḥisbah* 34
3. Tugas dan Wewenang *Wilāyah al-Ḥisbah* 38
4. Penerapan *Wilāyah al-Ḥisbah* 40

BAB III ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBUBARANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

| | | |
|----|---|----|
| A. | Kedudukan Organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 | 46 |
| 1. | Pengertian Organisasi Kemasyarakatan | 46 |
| 2. | Latar Belakang Berdirinya Organisasi Kemasyarakatan.. | 50 |
| 3. | Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan | 54 |
| 4. | Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan | 57 |
| B. | Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017..... | 62 |
| C. | Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan | 69 |

BAB IV PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

| | | |
|----|---|----|
| A. | Analisis Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan | 74 |
| B. | Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 | 81 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran | 88 |

DAFTAR PUSTAKA 89

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, demikian ini telah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-4 yang berbunyi bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagai bentuk hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala peraturan yang ada dalam ketatanegaraan haruslah bersumber pada UUD NRI 1945. Sehingga setiap peraturan yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, maka peraturan tersebut dihapuskan.

Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah dalam hal ini harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan masyarakat melalui perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi.

Konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi yang berarti penentu dalam penyelenggaraan

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peradilan dapat dijadikan proses terpenting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara hukum. Peradilan adalah hal memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, konkritnya kepada yang mohon keadilan, apa yang menjadi haknya atau hukumnya. Dalam pengadilan akan memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya selalu dipergunakannya atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku yang tidak lain berarti

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Sanksi administratif di atas berupa pencabutan status badan hukumnya atau dibubarkan tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu. Dengan ketentuan tersebut maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tidak sesuai dengan prinsip negara Indonesia yaitu sebagai negara hukum. Tugas pemerintah hanya memberi izin, mengawasi dan membina, tetapi menyangkut pembubaran itu merupakan tugas dari institusi pengadilan. Apabila suatu ormas melanggar aturan memang perlu adanya suatu ketegasan demi menjaga ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, tetapi tetap perlu adanya proses peradilan terlebih dahulu karena Indonesia merupakan negara hukum.

Yusril Ihza Mahendra saat diwawancarai para wartawan Kompas mengatakan, bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan Undang-Undang lama harusnya sudah cukup baik, UU tersebut mengatur agar pemerintah tidak mudah dalam membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), melainkan harus terlebih dahulu melakukan langkah persuasif, memberikan peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Apabila tidak efektif dan Pemerintah ingin membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dahulu sebelum

bagi pelaksanaan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu maupun masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹¹

Kekuasaan (*Sulṭah*) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1) Lembaga Legislatif (*Sulṭah tashrī'īyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, 2) Lembaga Eksekutif (*Sulṭah tanfidhīyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang, 3) Lembaga Yudikatif (*Sulṭah qadā'īyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.¹²

Peraturan perundang-undangan pada zaman Nabi yaitu dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan hasil kesepakatan antara para kepala suku atau kelompok. Namun kelompok Yahudi yaitu bani Qainuqa', bani Nadzir dan bani Quraidzah mengingkari kesepakatan Piagam Madinah, oleh sebab itu Nabi menjatuhkan hukum terhadap suku-suku Yahudi dikarenakan ketidaksetiaan mereka kepada persatuan umat.¹³

Islam tidak membiarkan orang atau suatu kelompok melakukan kemungkaran. Terlebih lagi kaitannya dengan penegakan peraturan dan keadilan serta terhindar dari kesewenang-wenangan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :

¹¹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 27.

¹² Imam Amrusi Jaclani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 19.

¹³S.Sagap, "Implementasi Pluralitas Agama pada Pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah Tahun 622-632 M", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 22 No. 2 (Desember, 2007), 39.

1. Identifikasi Masalah

- a. Kewenangan Pemerintah terhadap pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Adanya pelanggaran HAM terkait pembubaran Organisasi Kemasyarakatan tanpa adanya proses Peradilan.
- c. Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan melalui proses Peradilan.
- d. Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan perspektif *Fiqh Siyāsah*.
- e. Lembaga yang berwenang dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dalam mencapai penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut :

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan, khususnya bagi kemajuan disiplin Ilmu Hukum Tata Negara dalam hal memberikan pandangan tentang proses penegakkan peradilan di Indonesia khususnya mengenai pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.

3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didalamnya terdapat beberapa aturan mengenai Organisasi Masyarakat di Indonesia, Undang-Undang ini merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 atas perubahan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2013.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.²³ Hal yang penting dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan hukum tertentu. Dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yang kaitannya

²³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- 3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan data yang dikumpulkan secara tidak langsung.²⁶ Artinya data yang bersifat membantu atau menunjang sumber primer, diantaranya adalah:

- 1) Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- 2) Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- 3) Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- 4) Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- 5) Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

²⁶ Ibid.

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, memuat landasan teori yang berisi pembahasan tentang Tinjauan umum tentang *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*, ruang lingkup dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*, teori *Wilāyah al-Ḥisbah* dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* dan pemaparan mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.

Bab III, memuat data penelitian yang menyajikan pembahasan tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Bab IV, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Bab ini merupakan inti dari pembahasan masalah yang dibahas dan merupakan jawaban yang terdapat dalam perumusan dan pembatasan masalah, maka dalam bab ini menguraikan tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bab V, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian diikuti oleh penyampaian saran.

hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah, *ulil amri*, dan *wulatul amri*). Oleh karena itu, segala produk tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi oleh segala umat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, yaitu adanya perbedaan pendapat dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah pemeluknya. Namun perbedaan tersebut bukanlah suatu perbedaan prinsipal, karena bersifat teknis saja. Menurut Abdul Wahhab me

hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah, *ulil amri*, dan *wulatul amri*). Oleh karena itu, segala produk tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi oleh segala umat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, yaitu adanya perbedaan pendapat dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah pemeluknya. Namun perbedaan tersebut bukanlah suatu perbedaan prinsipal, karena bersifat teknis saja. Menurut Abdul Wahhab me

hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah, *ulil amri*, dan *wulatul amri*). Oleh karena itu, segala produk tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi oleh segala umat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, yaitu adanya perbedaan pendapat dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah pemeluknya. Namun perbedaan tersebut bukanlah suatu perbedaan prinsipal, karena bersifat teknis saja. Menurut Abdul Wahhab me

- hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah, *ulil amri*, dan *wulatul amri*). Oleh karena itu, segala produk tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi oleh segala umat.
- ## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*
- Menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, yaitu adanya perbedaan pendapat dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah pemeluknya. Namun perbedaan tersebut bukanlah suatu perbedaan prinsipal, karena bersifat teknis saja. Menurut Abdul Wahhab me

hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah, *ulil amri*, dan *wulatul amri*). Oleh karena itu, segala produk tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi oleh segala umat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, yaitu adanya perbedaan pendapat dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah pemeluknya. Namun perbedaan tersebut bukanlah suatu perbedaan prinsipal, karena bersifat teknis saja. Menurut Abdul Wahhab me

- Siyāṣah Dustūriyyah;*
- Siyāṣah Mālīyyah;*
- Siyāṣah Qadā'iyyah;*
- Siyāṣah Harbīyyah;*
- Siyāṣah Idāriyyah.*

- Siyāsah Qadā’iyyah;*
- Siyāsah Mālīyyah;*
- Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijīyyah;*
- Siyāsah Idāriyyah.*

Beberapa pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, politik perundang-undangan yang disebut dengan *Siyāsah Dustūriyyah*, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tashrī'yyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadā'yyah* oleh lembaga yudikatif berarti tentang

⁶ Ibid, 14.

peradilan yang sesuai menurut syariat, dan mengenai administrasi pemerintahan yang sesuai dengan syariat atau *Idāriyyah* oleh eksekutif.⁷

Kedua, *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah*, yang dapat disebut juga dengan istilah politik luar negeri. Bagian ini adalah cakupan yang berhubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim dan yang bukan warga negara. Adapula politik masalah peperangan atau yang disebut dengan *Siyāsah Harbiyyah*, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, *Siyāsah Māliyyah* yang merupakan politik keuangan dan moneter. Membahas mengenai sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, serta kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁸

3. *Siyāṣah Dustūriyyah* dan Ruang Lingkupnya

Siyāṣah Dustūriyyah berasal dari kata “*dustūr*” yang asalnya dari bahasa Persia, yang mempunyai arti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Kemudian mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang secara

⁷ Imam Amrusi Jaelani Islam, dkk., *Hukum Tata Negara*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15.

⁸ Ibid, 15-16.

Penggunaan istilah *fiqh dustūrī*, apabila dipahami lebih lanjut merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustūriyyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustūriyyah* dalam satu negara sudah tentu beberapa aturan dan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustūriyyah*. *Dustūriyyah* dalam konteks negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁹ Ibid, 22.

- a. Lembaga legislatif (*Sulṭah tashrī'īyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang;
- b. Lembaga eksekutif (*Sulṭah tanfidhīyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang;
- c. Lembaga yudikatif (*Sulṭah qadā'īyyah*), lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang termasuk didalamnya terkait masalah-masalah peradilan.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan merupakan lembaga Islam yang dibagi menjadi lima bidang, yaitu:¹⁴

¹⁴ Ibid., 19.

Tugas pengadilan dalam Islam yaitu untuk dijadikan tujuan utama dalam menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan bersalah. Lembaga yang menangani bentuk pelanggaran-pelanggaran yaitu lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam.¹⁵

Lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islamdi dalam perkembangannya dapat dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut yaitu, *wilāyah al-Qada'*, *wilāyah al-Mazālim*, *wilāyah al-Hisbah*. *Wilāyah al-Qada'* merupakan lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama, baik perdata maupun pidana. *Wilāyah al-Mazālim* adalah lembaga peradilan

[illegible]

Dasar hukum *wilāyah al-Ḥisbah* sebagaimana firman Allah yang

termaktub dalam surat Ali Imran ayat 104 berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”²²

Serta dalam surat Ali Imran Ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada *ma'ruf*, dan mencegah yang *munkar*, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”²³

Sabda Nabi :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ²⁴

²² Qur'an In Word : Ali Imran 104.

²³ Our'an In Word : Ali Imran 110.

²⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 126.

2. Sejarah Wilāyah al-Hisbah

²⁵ Sam'un, *Hukum Peradilan Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 127.

- a. Pernyataan persatuan antara Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang berhubungan dan berjuang bersama mereka;
- b. Orang-orang yang berlaku zalim atau membuat permusuhan kepada beberapa orang mukmin, namun harus diatasi walaupun dengan keluarga sendiri;
- c. Orang Yahudi saling membantu dengan orang mukmin dalam menghadapi musuh, dan bebas menjalankan agamanya masing-masing, namun beberapa kaum Yahudi melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan dalam perjanjian Piagam Madinah.
- d. Orang-orang yang bertetangga seperti satu jiwa dan tidak boleh untuk saling berbuat dosa;
- e. Beberapa orang yang bermukim di Madinah berstatus aman kecuali orang melakukan zalim dan berbuat dosa.

134.

[illegible]

Setelah Rasulullah wafat, tradisi *al-Hisbah* ini masih berlanjut pada sahabat Umar Ibn Khattab, ia menugaskan Abdullah Ibn Utbah menjadi pengawas pasar ke Madinah. Umar sangat tegas dalam memberlakukan *al-Hisbah* sehingga ia pernah memerintahkan untuk membakar rumah Rasyid ats-Tsaqafi karena ia tertangkap menjual minuman keras. Juga diriwayatkan Umar Ibn Khattab pernah memukul penyewa unta untuk transportasi lantaran membebani unta sewanya itu terlalu berat.²⁸

Umar Ibn Khattab merupakan tokoh pertama yang mengembangkan dan membentuk lembaga *al-Hisbah* tersebut. Pelembagaan dan perkembangan lembaga *al-Hisbah* berkembang sejalan dengan perkembangan Islam ke berbagai penjuru dunia. Mengingat kekuasaan Islam semakin meluas, para penduduk di daerah-daerah yang ditaklukan dan masuk Islam, sudah tentu tingkat keimanan, kadar ketaatan dan kesadaran hukum untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran

²⁸Basiq Djalil, *Pradilan Islam*, 125.

Tugas *al-Hisbah* adalah melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan dan ketentuan agama serta memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas *al-Hisbah*. Tugas hakim yaitu memutuskan perkara terhadap pertengkaran-pertengkaran yang dikemukakan kepadanya dan mengharuskan orang yang kalah mengembalikan kepada hak orang yang menang, sedangkan tugas *muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya Undang-Undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun serta menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat.³³

³² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 127.

[illegible]

menegur dan menghukum. Bagaimanapun kekuasaan tersebut terbatas kepada hal-hal tertentu saja, untuk mencegah terjadinya tumpah tindih antara tugas *muhtasib* dengan hakim.³⁴

Fungsi terpenting *wilāyah al-Ḥisbah* adalah *amar ma'rufnahi munkar*, maka tugas ini pada hakekatnya harus dilaksanakan, khususnya umat Islam. Namun demikian, sebagai sebuah lembaga kenegaraan yang bukan menganut sistem negara Islam, tetapi penduduknya mayoritas beragama Islam seperti contoh Indonesia, Penanggung jawab pelaksanaannya ditangani oleh orang-orang tertentu yang secara khusus ditugaskan menanganinya yakni disebut *muḥtasib*. *Muḥtasib* wajib memberikan bantuan kepada orang yang meminta bantuan serta *muḥtasib* harus membahas dan meneliti kemungkaran-kemungkaran yang nyata untuk memberikan sanksi hukuman serta mencegah terjadinya sebagaimana dia harus memeriksa tentang perbuatan-perbuatan *ma'ruf* yang tidak dikerjakan oleh orang-orang yang harus mengerjakannya untuk menyerukan orang tersebut mengerjakannya.³⁷

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuahu* 8, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 382.

[illegible]

Kasus tiga suku utama Yahudi tersebut tidak tercantum dalam naskah Piagam karena penyebabnya yaitu mereka berkhianat dengan bentuk pelanggaran yaitu bani Qainuqa' karena sering mengintimidasi kaum muslimin dan menyebarkan kebencian atas kesuksesan umat Islam yang menang dalam perang Badar, kemudian nabi berunding atau melakukan musyawarah terlebih dahulu dan menawarkan secara sukarela agar mereka tetap mau menjalankan sesuai kesepakatan, namun akhirnya mereka tidak dapat ditolerir kemudian Nabi saw melakukan pengusiran terhadap mereka pada tahun 2 Hijriyah. Adapun bani Nadzir melakukan rencana makar untuk membunuh nabi setelah perang Uhud, dan setelah musyawarah serta menawarkan sukarela agar kembali menaati peraturan yang telah disepakati dan akhirnya demi kemaslahatan umat pada

[illegible]

Demikian alasan utama nabi menjatuhkan hukum terhadap kaum-kaum Yahudi karena kaum-kaum tersebut melakukan suatu kemungkar terhadap peraturan yang telah disepakati dengan tujuan persatuan seluruh umat dan demi kemaslahatan bersama. Sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang telah dikukuhkan dalam Piagam Madinah yang juga mereka tanda tangani dan nabi Muhammad juga sekaligus mengemban tugas *al-Ḥisbah*. Tindakan mereka jelas merupakan tindakan pengkhianatan terhadap kesepakatan bersama nabi Muhammad. Pada masa itu, lembaga *wilāyah al-Ḥisbah* belum terbentuk secara khusus namun praktik-praktiknya sesuai dengan

[illegible]

- a. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
- b. Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- c. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan dalam menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- d. Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi harus memiliki struktur kepengurusan pada setiap wilayah, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas;
- e. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
- f. Mempunyai sistem kaderisasi dan regenerasi yang jelas, berlandaskan pada aspek moralitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Organisasi Kemasyarakatan dengan demikian disebut sebagai wadah guna untuk tempat beberapa sekelompok orang yang dibentuk dengan memiliki visi dan misi yang sama, harus mempunyai anggota serta regenerasi yang jelas, memiliki kepengurusan yang jelas dengan

[illegible]

Beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang dimaksud yaitu sebagai wadah semua organisasi yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan sarana untuk berserikat, berkumpul, serta dapat menyalurkan pendapat dan pikiran sebagai anggota masyarakat dan keikutsertaan secara aktif dalam membangun dan mewujudkan Negara sesuai dengan Pancasila dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh salah satunya yaitu kelompok-kelompok atau Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang

[illegible]

Beberapa organisasi masyarakat terus hidup dan tumbuh pada pemerintahan orde baru, baik yang ada keterkaitannya dengan pemerintahan maupun yang tidak, seperti Organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), ada juga organisasi di bidang lainnya seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI, Ormas SOKSI, Kosgoro dan ada banyak organisasi-organisasi yang terus tumbuh dan berkembang pasca reformasi.

Organisasi Kemasyarakatan semakin berkembang dan semakin banyak yang terbentuk dan didirikan dengan seiring berkembangnya zaman, seperti organisasi masyarakat dibidang keagamaan Islam yaitu Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan hingga saat ini menjadi bahan pembicaraan mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila adalah Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang pada tahun 2017 telah dicabut

[illegible]

Kebebasan warga negara untuk berekspresi telah diterapkan ke dalam sebuah institusi yang tertata secara rapi dalam bentuk wadah yang disebut dengan Organisasi Kemasyarakatan, namun tetap dalam batasan. Dan batasan tersebut berupa peraturan yang mengikat kepada organisasi agar tidak bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. Kesadaran akan hak atas kebebasan berserikat dalam bentuk Organisasi Kemasyarakatan semakin berkembang. Hingga pada tahun 2017, menurut Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyebutkan bahwa data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlahnya mencapai 344.039 Ormas di Indonesia. Tercatat 370 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT), 71 Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing, sedangkan yang terdata di daerah lebih banyak lagi. Di tingkat provinsi, tercatat 7226 Ormas tidak berbadan hukum, sedangkan di pemerintahan daerah kabupaten dan kota sebanyak 14890 Ormas yang tidak berbadan hukum. Sementara di Kementerian Hukum dan HAM, ada 321.482 organisasi yang berbentuk Yayasan dan Perkumpulan. Dan di tahun 2018 sudah ada total 394.250 Ormas yang telah terdaftar.¹¹

¹¹ Humas, “Jumlah Ormas di Indonesia”, [Http://setkab.go.id/kemendagri-jumlah-ormas-di-indonesia-ada-344-039/](http://setkab.go.id/kemendagri-jumlah-ormas-di-indonesia-ada-344-039/), (Diakses pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 19.10 WIB)

Kesadaran sebuah organisasi masyarakat akan tumbuh dan berkembang yang merupakan guna untuk pertumbuhan dan kemajuan masyarakat Indonesia, dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya organisasi masyarakat dalam tercapainya bangsa Indonesia yang lebih maju, sekaligus kesadaran masyarakat dalam berorientasi kepada pembangunan nasional berbangsa dan bernegara.

Organisasi Kemasyarakatan dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan, maka tentunya memiliki tujuan dan fungsi untuk memenuhi keperluan anggotanya sebaik mungkin. Kesejahteraan anggota merupakan tujuan utama sebuah organisasi. Dapat diartikan

[illegible]

Fungsi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dalam negara demokrasi khususnya di Indonesia, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu:¹⁵

- ¹⁵ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk pemerintah yang pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, diperlukan pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah akhirnya melakukan revisi yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.¹⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan dianggap tidak lagi memadai sebagai sarana untuk

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Indonesia. Namun harus diketahui terlebih dahulu apa larangan-larangan ormas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut, yaitu:²³

Pasal 59

- (1) Ormas dilarang:
 - a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan warna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
 - b. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
 - c. Menggunakan nama, lambang, bendera, dan tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
 - a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (3) Ormas dilarang:
 - a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
 - d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ormas dilarang:
 - a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

²³ Lihat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia yang melakukan larangan diatas akan dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah, ketentuan sanksi tersebut telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:²⁴

Pasal 60

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi Sanksi Administratif;
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi Sanksi Administratif dan/atau Sanksi Pidana.

Pasal 61

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri di atas:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 80A

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang ini.

Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dapat dikatakan lebih ringkas karena menggunakan *asas contrarius actus* yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya, hal tersebut secara eksplisit telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 61 ayat (3)

²⁴ Lihat Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Permohonan terhadap pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan dengan atas permintaan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.²⁹ Dan permohonan pembubaran ormas harus diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jangka dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Mahkamah Agung.³⁰

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dilakukan dengan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka setelah itu pemerintah dapat mencabut status badan hukum ormas. Jadi sangat terlihat perbedaan antara mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang menjadi pertanyaan yaitu, bilamana ormas dibubarkan, apa dasar atau alasan sehingga

³⁰Lihat Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

pemerintah dapat membubarkan tanpa langkah persuasif atau legitimasi peradilan terlebih dahulu?

Organisasi Kemasyarakatan yang telah dibubarkan pemerintah dengan menggunakan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 atas Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, melalui Kementerian Hukum dan HAM adalah Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-3-.A.H.01.08 Tahun 2017.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat terkait keluarnya pembubaran ormas yaitu, bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan Undang-undang lama harusnya sudah cukup baik, UU tersebut mengatur agar pemerintah tidak mudah dalam membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), melainkan harus terlebih dahulu melakukan langkah persuasif, memberikan peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Apabila tidak efektif dan Pemerintah ingin membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dahulu sebelum membubarkan ormas tersebut. Ketentuan tersebut sangat relevan karena tetap menggunakan proses pengadilan terlebih dahulu. Namun, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 ini, semua prosedur tampak dihilangkan.

Pemerintah dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur di atas.³¹

Berbeda dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa pemerintah sudah tepat membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta menegaskan kembali bahwasannya mendirikan ormas tidak boleh menimbulkan efek perpecahan seperti ormas HTI yang ingin mendirikan *khilāfah* di Indonesia merupakan melanggar ideologi Pancasila dan konstitusi dan akan membahayakan kesatuan negara Indonesia. Beliau menambahkan yaitu di Indonesia berdasarkan konstitusi semua orang bebas berpendapat, termasuk berpendapat anti Tuhan, tetapi akan menimbulkan potensi permusuhan, oleh karena itu *freedom of association* bisa dibatasi dengan Undang-Undang.³²

Pemerintah memiliki 3 alasan dibalik pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pertama, HTI dipandang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI telah terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan dalam masyarakat

³¹ Ihsanuddin, “Kritik Yusril soal Perppu Pembubaran Ormas”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/20521511/kritik.yusril.soal.perppu.ormas>, (diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 09.14 WIB)

³² Nurul Afrida, “Jimly Asshiddiqie Tegaskan Pembubaran HTI Sah Secara Hukum”, <http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/jimly-asshiddiqie-tegaskan-pembubaran-hti-sah-secara-hukum>, (diakses pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 07.15 WIB)

yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.³³

Ormas HTI dianggap dan berideologi agama Islam dan menentang Pancasila. Menurut ormas HTI, hukum Islam mustahil dapat diterapkan dengan sempurna kecuali dengan adanya *khilāfah* (negara Islam) dan seorang *khalifah*. Dengan ideologi tersebut sangat jelas bertentangan dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila, oleh karena itu pemerintah menganggap bahwa ormas HTI telah menyimpang dari ideologi Pancasila dan merupakan ormas yang radikal dan perlu untuk dibubarkan.

C. Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Kewenangan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintah pasti ada kaitannya dengan asas legalitas dalam konsepsi negara hukum yang demokratis. Asas legalitas merupakan pijakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut sistem negara hukum. Jadi pemerintah dalam hal ini diwajibkan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang memberikan beban atau kewajiban kepada warga negara haruslah berdasarkan suatu dasar hukum yang sah. Dalam hukum pidana, asas legalitas memiliki arti yakni bahwa tidak ada suatu hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa terlebih dahulu ditetapkan suatu Undang-Undang.³⁴

³³ Prianter Jaya Hairi, “Landasan Hukum Rencana Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”, *Jurnal Hukum*, Vol. IX No. 10, (Mei, 2017), 2.

³⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 93.

1. Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang lebih ditetapkan;
2. Legitimitas, artinya perbuatan atau tindakan pemerintah jangan sampai menimbulkan suatu kekacauan akibat tidak dapat diterima oleh masyarakat atau lingkungan yang bersangkutan;
3. Yuridikitas adalah syarat, bahwa perbuatan para pejabat tidak boleh melanggar hukum;
4. Legalitas merupakan syarat, bahwa tindakan atau perbuatan pemerintah harus berdasarkan pada Undang-Undang (tertulis), apabila dengan lebih “keadaan darurat” maka perlu dibuktikan, bilamana tidak terbukti maka dapat digugat dipengadilan;

[illegible]

**ANALISIS *FIQH SIYASA* TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2017**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang artinya bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), hal ini berarti dapat menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta segala sesuatu yang dilakukan baik rakyat maupun pemerintah harus berdasarkan hukum.

[illegible]

Mekanisme pembubaran ormas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yaitu apabila ormas melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang seperti dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c yang berbunyi ormas dilarang “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”, maka dalam Pasal 60 ayat (2) menerangkan ormas yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sesuai Pasal 61 ayat (3) menyatakan, sanksi administratif tersebut yaitu pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri dan pencabutan status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggaraan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dan dalam Pasal 80A menjelaskan bahwa pencabutan status badan hukum tersebut sekaligus dinyatakan bahwa ormas telah dibubarkan. Pencabutan surat keterangan terdaftar ormas tersebut disahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh PTUN.

[illegible]

Yusril Ihza Mahendra berpendapat terkait keluarnya pembubaran ormas yaitu, bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan Undang-Undang lama harusnya sudah cukup baik, UU tersebut mengatur agar pemerintah tidak mudah dalam membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), melainkan harus terlebih dahulu melakukan langkah persuasif, memberikan peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Apabila tidak efektif dan Pemerintah ingin membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dahulu sebelum membubarkan ormas tersebut. Ketentuan tersebut sangat relevan karena tetap menggunakan proses peradilan terlebih dahulu. Namun, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 ini, semua prosedur tampak dihilangkan. Pemerintah dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur di atas.

[illegible]

tersebut membangun bangsa akan dianggap makar dan radikal serta berakibat ormas tersebut dibubarkan oleh pemerintah. Karena dalam Undang-Undang ormas tersebut tidak menyebutkan batasan dari kewenangan pemerintah dalam menggunakan asas *contrarius actus*.

Benar adanya bahwa ormas HTI merupakan ormas yang radikal dan bertentangan dengan Pancasila dan perlu dibubarkan karena dapat membahayakan negara Indonesia yang berideologi Pancasila, namun mekanisme pembubaran dalam Pasal 61 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2017 yang tanpa adanya pertimbangan hukum peradilan tersebut dapat merugikan ormas lain dalam berserikat dan mengeluarkan aspirasinya serta jaminan dan perlindungan hukum yang sama dihadapan hukum, karena dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan pembatasan wewenang pemerintah dalam pencabutan status badan hukum, sehingga merugikan ormas lain.

Dengan demikian mekanisme pembubaran ormas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memang benar adanya karena dengan Undang-Undang Ormas ini menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, namun tetap diperlukan adanya batasan terhadap pemerintah dalam Undang-Undang tersebut dikarenakan dalam Pasal 61 ayat (3) tersebut menghilangkan mekanisme dan pertimbangan peradilan, walaupun pencabutan surat keterangan terdaftar tersebut disahkan dengan KTUN dari PTUN namun agar tetap menjaga hak asasi ormas tetap diperlukan legitimasi peradilan dalam pembubaran ormas sehingga pemerintah tidak dapat melakukan kesewenang-wenangan dalam memberikan keputusan pencabutan

demikian diselaraskan dengan menggunakan tinjauan *fiqh siyāsah* khususnya *siyāsah dustūriyyah*.

Kewenangan pemerintahan dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dalam Undang-Undang terbaru ormas merupakan bentuk dari kekuasaan dan kaitannya dengan peradilan. Jika ditinjau menggunakan *siyāṣah dustūriyyah*, maka akan lebih dikhususkan kembali objek kajian mengenai hal tersebut. Dalam pembahasan *siyāṣah dustūriyyah* memiliki konsep kekuasaan dalam sebuah negara yaitu salah satunya, *sulṭah qadā'īyyah* (kekuasaan yudikatif), lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman/peradilan.

Kekuasaan kehakiman dalam Islam (*Sulṭah qadā'īyyah*) dibagi menjadi tiga institusi atau lembaga, meliputi *wilāyah al-Qada'* yaitu lembaga peradilan untuk memutuskan perkara awam sesama warganya. *Wilāyah al-Mazālim* yaitu lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Adapun *wilāyah al-Ḥisbah* yaitu lembaga yang khususnya mengawasi serta menekan ajakan untuk berbuat kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dasar dari *al-Ḥisbah* yaitu surat Ali Imran ayat 104;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

[illegible]

1. Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap perlu adanya pertimbangan peradilan dalam pembubaran ormas, agar tetap menjamin hak-hak ormas dalam kepastian hukum yang adil sesuai dengan yang sudah diatur dalam UUD NRI 1945. Atau adanya batasan terhadap pemerintah dalam apabila tetap menggunakan *asas contrarius actus*. Karena akan berdampak kesewenang-wenangan pemerintah dalam melakukan pencabutan status badan hukum ormas.
2. Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini nantinya akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca maupun masyarakat lebih banyak tau batasan akan berpendapat atau mengeluarkan aspirasi dalam bentuk Organisasi Kemasyarakatan agar tidak adanya perpecahan dalam NKRI. Dan semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dan bermanfaat bagi para pembaca lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Balai Aksara, 1995.
- Azhari, Muhammad Thahir. *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1987.
- Badudu-Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: 2006.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Furqoni, Nafas. *Hisbah dan Aplikasinya*. Jakarta: Possei, 2010.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang, Setara Press, 2016.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jaelani, Imam Amrusi, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

